

Cerita Perubahan dari Studi Komparatif Global tentang REDD+ Mendukung Implementasi Pendekatan Yurisdiksi di Indonesia

Sandy Nofyanza, Swetha Peteru, Tobias Thürer dan Amy E Duchelle

Pesan-pesan kunci

- Melalui kemitraan erat dengan asosiasi pemerintahan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan upaya awal menunjukkan kemajuan berkelanjutan pada yurisdiksi subnasional, CIFOR melanjutkan aktivitasnya pada pendekatan yurisdiksional dalam pembangunan desa rendah emisi di tingkat kabupaten di Indonesia.
- Kemitraan antara CIFOR dan LTKL dimulai pada 2019 dan telah membuahkan hasil, antara lain kontribusi pada nota konsep pendekatan yurisdiksional yang telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, serta penyusunan profil yurisdiksi tingkat kabupaten yang pertama (di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat). Profil ini diluncurkan pada Forum Bentang Alam Global (*Global Landscape Forum*), 2020.
- Bersama dengan LTKL, CIFOR merancang kuesioner dan metode pengumpulan data untuk Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD). KDSD adalah sebuah sistem pemantauan dan pelaporan yang dikembangkan oleh Sekretariat LTKL dan kabupaten anggotanya untuk mengukur kemajuan kabupaten dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). CIFOR juga mengembangkan panduan untuk pelatihan dan pelaksanaan KDSD.
- Pendekatan yurisdiksi diperluas dan direplikasi, semakin banyak anggota LTKL menunjukkan minatnya dalam menerapkan KDSD dan menyusun profil yurisdiksi.

Pengantar: Riset awal terkait pendekatan yurisdiksi

Pendekatan yurisdiksi dalam pembangunan desa rendah emisi adalah metode komprehensif yang bertujuan menyeimbangkan persaingan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan di sebuah wilayah administratif. Pendekatan ini menarik perhatian global karena pemerintah umumnya memainkan peran sentral sehingga dapat lebih menyelaraskan berbagai inisiatif dan program dalam ranah pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan publik (Boyd dkk. 2018). Yurisdiksi subnasional seperti provinsi dan kabupaten diakui sebagai kunci dalam menerapkan pendekatan yurisdiksi karena keduanya memiliki kewenangan hukum dan dekat dengan masyarakat yang sehari-harinya membuat keputusan terkait penggunaan lahan (Stickler dkk. 2018a). Aksi di tingkat subnasional juga dapat membantu menekankan betapa pentingnya hutan dan tata kelola tingkat lokal dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat global (de Sassi

dkk. 2014; Wunder dkk. 2020). Pendekatan yurisdiksi yang kita kenal saat ini dibangun dari pengalaman implementasi inisiatif Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* atau REDD+) selama lebih dari satu dekade, serta pengalaman sektor swasta dalam melaksanakan komitmen keberlanjutan (Seymour dkk. 2020). Keduanya memiliki tujuan yang saling terkait di seluruh skala dan sektor pemerintahan sambil juga mempromosikan keterlibatan pemangku kepentingan secara berkeadilan.

Melalui Studi Komparatif Global tentang REDD+ (GCS REDD+), sejak 2010, CIFOR telah mengevaluasi kinerja inisiatif REDD+ di tingkat lokal dan subnasional di enam negara tropis (Sills dkk. 2014) – termasuk di antaranya program REDD+ skala yurisdiksi pertama di dunia di Acre, Brazil (Duchelle dkk. 2014) – sekaligus mengkaji tantangan tata kelola REDD+ di berbagai tingkat pemerintahan (Ravikumar dkk. 2015). Untuk memperluas cakupan penelitian ini, pada 2016 dan 2017 CIFOR membentuk aliansi strategis dengan Earth Innovation Institute (EII), Governors' Climate and Forest Task Force (GCF-TF), dan

Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) untuk memfokuskan diri pada pendekatan yurisdiksi subnasional dalam konteks REDD+. Secara bersama, para mitra ini telah mengevaluasi kemajuan pembangunan berkelanjutan di tingkat subnasional di 35 yurisdiksi anggota GCF-TF serta empat yurisdiksi lainnya di 12 negara tropis (Stickler dkk. 2018b). Selain publikasi laporan sintesa yang ditujukan untuk para pembuat kebijakan, evaluasi ini memberikan analisis singkat tentang setiap yurisdiksi yang dikenal sebagai ‘profil yurisdiksi’ (*jurisdictional profile*).¹ Melalui kerja sama ini para mitra pun mengeksplorasi kondisi pendorong untuk pembangunan berkelanjutan di beberapa aspek di berbagai yurisdiksi tersebut dengan menggunakan Perangkat Pemeringkatan Bentang Alam Berkelanjutan (*Sustainable Landscape Rating Tool*) yang dikembangkan oleh CCBA (Peteru dkk. 2021).

Inforringkas ‘cerita perubahan’ yang penyusunannya dikoordinasi oleh tim evaluasi Research to Impact (RTI) CIFOR ini, mendeskripsikan kegiatan-kegiatan CIFOR yang sedang berlangsung untuk mendukung implementasi pendekatan yurisdiksi di tingkat kabupaten di Indonesia. Inforringkas ini mengangkat kemajuan yang dicapai sampai saat ini dengan pemetaan menggunakan teori perubahan (*theory of change*, ToC), dilengkapi arah potensial untuk penelitian dan pelibatan lebih lanjut di masa depan.² Temuan yang disajikan di sini dikumpulkan oleh konsultan independen melalui wawancara dengan 10 pemangku kepentingan utama dan tinjauan data sekunder, termasuk laporan dan regulasi pemerintah. Lokakarya dengan para ilmuwan kunci di CIFOR juga dilakukan untuk menganalisis data-data yang dikumpulkan.

Pengetahuan dan keterlibatan CIFOR dalam pendekatan yurisdiksi

Pada 2019, CIFOR memulai kerja sama dengan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dengan fokus pada penilaian kemajuan pembangunan berkelanjutan di berbagai kabupaten di Indonesia.³ CIFOR mendukung LTKL dalam menyelesaikan penetapan indikator untuk Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) dan bersama-sama mengembangkan kuesioner dan metode pengumpulan data untuk KDSD tersebut. KDSD merupakan sintesa dari berbagai indikator kinerja, termasuk yang dibutuhkan untuk pelaporan pemerintahan daerah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KDSD disusun oleh Sekretariat LTKL dan

kabupaten anggotanya sebagai sarana untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan tiap kabupaten dalam mencapai target nasional, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) (LTKL n.d.; Syahrani dkk. 2020). Sebagai awal, LTKL dan kabupaten anggotanya sepakat untuk fokus pada transformasi rantai pasok komoditas pertanian, terutama kelapa sawit, kelapa, cokelat, karet, rempah, kopi, dan hasil hutan bukan kayu (LTKL 2019). Oleh karena itu, KDSD menggabungkan indikator-indikator produksi yang berkelanjutan atas komoditas-komoditas tersebut. Sistem pemantauan dan pelaporan sukarela (*voluntary*) yang lebih ramping dan kredibel seperti yang dibayangkan di bawah KDSD diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya tarik kabupaten untuk investasi baru dan berkelanjutan. Saat ini, KDSD sedang diujicobakan di Kabupaten Gorontalo (Gorontalo), Siak (Riau), dan Sintang (Kalimantan Barat). CIFOR juga mengembangkan pedoman untuk pelatihan KDSD dan implementasinya, dan juga mendukung kabupaten anggota LTKL dalam menampilkan kemajuan dan potensi pembangunan berkelanjutan mereka untuk menarik investasi baru dan ‘hijau’ melalui pembuatan profil yurisdiksi tingkat kabupaten.

Dari penyusunan nota konsep hingga menampilkan kemajuan pembangunan berkelanjutan di kabupaten

Kemitraan erat dan tingkat kepercayaan yang tinggi antara CIFOR dan LTKL memperkuat implementasi pendekatan yurisdiksi. Di tingkat nasional, kemitraan ini membuka pintu bagi CIFOR untuk membantu mengembangkan nota konsep pendekatan yurisdiksi yang dipelopori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan difasilitasi oleh Sekretariat LTKL. Bappenas menggunakan nota konsep ini sebagai dasar untuk mengintegrasikan pendekatan yurisdiksi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Seymour dkk. 2020; Pemerintah Republik Indonesia 2020) – sebuah bukti nyata yang menegaskan pentingnya pendekatan yurisdiksi dalam wacana pembangunan kontemporer Indonesia. Pengalaman CIFOR dalam menilai dan mendokumentasikan status pembangunan berkelanjutan di tingkat provinsi dan negara bagian juga terbukti menjadi aset dalam mengembangkan nota konsep tersebut, sebagaimana diakui oleh salah satu perwakilan Sekretariat LTKL, “Kami mengundang CIFOR [untuk mengembangkan nota konsep pendekatan yurisdiksi di Bappenas] sebagai salah satu organisasi kunci yang dapat memberikan wawasan kepada tim kerja ... terutama tentang apa yang telah dilakukan CIFOR di tingkat provinsi.” Responden mengacu pada ‘profil yurisdiksi’ yang dipublikasikan oleh CIFOR dan EII yang memungkinkan yurisdiksi tingkat provinsi dan negara bagian untuk menyajikan progres pembangunan berkelanjutan mereka.

1 Profil-profil yurisdiksi dapat diakses di <https://www.cifor.org/knowledge/publication/6999/>

2 Narasi dalam inforringkas ini disusun mengikuti jalur dampak di sepanjang teori perubahan (ToC). Penggambaran grafisnya ditampilkan di Gambar 1.

3 LTKL adalah jejaring yang terdiri atas 9 kabupaten anggota aktif dari 6 provinsi di Indonesia yang bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Di tingkat kabupaten, CIFOR berkontribusi keparannya pada LTKL dalam menetapkan metodologi dan aspek teknis lainnya untuk proses implementasi KDSD. Sekretariat LTKL dan CIFOR bersama-sama menyelenggarakan lokakarya di Bogor dan tiga kabupaten percontohan KDSD pada akhir 2019. Lokakarya di Bogor bertujuan untuk memperkenalkan KDSD kepada mitra kabupaten serta kementerian dan organisasi-organisasi kunci, serta untuk menyepakati dasar-dasar KDSD, mendiskusikan metode pengumpulan data dan implementasi, dan menginformasikan kepada para peserta tentang penelitian-penelitian CIFOR terkait pendekatan yurisdiksi. Lokakarya di kabupaten memiliki tujuan yang sama, dengan tujuan tambahan untuk memperkuat keselarasan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan perwakilan dari Kemendagri, membangun kapasitas pemangku kepentingan untuk melaksanakan KDSD, dan membantu mereka membentuk tim pelaksana KDSD di kabupaten yang terdiri atas unsur pemerintahan maupun non-pemerintahan.⁴ Kegiatan tersebut sangat penting untuk keberhasilan KDSD; dengan pemerintah kabupaten memimpin pengumpulan data dan pelaksanaan KDSD, diperlukan rasa kepemilikan yang tinggi agar inisiatif ini berhasil. Dalam wawancara, perwakilan dari berbagai organisasi pemangku kepentingan terkait mengakui, melalui lokakarya ini, CIFOR telah membekali kabupaten dengan kapasitas yang diperlukan untuk menerapkan KDSD.

Melalui penyusunan kerangka evaluasi dan pengukuran dampak, CIFOR terus mendukung Sekretariat LTKL dalam menampilkan potensi ekonomi dan keberlanjutan dari kabupaten-kabupaten anggotanya untuk menarik investasi baru dan 'hijau'. Kolaborasi ini telah mengarah pada tersusunnya profil yurisdiksi tingkat kabupaten pertama untuk Kabupaten Sintang (Sukri dkk. 2020), yang dilakukan secara kolaboratif dengan perwakilan pemerintah kabupaten, organisasi non-pemerintah (LSM), asosiasi masyarakat, dan akademisi. Bersama CIFOR dan LTKL, Pemerintah Kabupaten Sintang meluncurkan profil ini pada Forum Bentang Alam Global (*Global Landscape Forum*, GLF) 2020.⁵ Menurut Sekretariat LTKL, kesempatan untuk menunjukkan pencapaian kemajuan keberlanjutan kabupaten pada panggung global semacam ini adalah insentif yang dapat menghidupkan kembali semangat pemerintah kabupaten, terutama dalam hal inisiatif keberlanjutan dan aspek terkait pemantauan.

4 Tim implementasi KDSD di Kabupaten Sintang dan Gorontalo telah dibentuk secara formal melalui Surat Tugas Bupati Sintang No. 049/4991/II-BAPPEDA/2019, dan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Gorontalo No. 255/28/III/2020. Walaupun belum diresmikan, Tim KDSD di Kabupaten Siak pun telah dibentuk dan kegiatan pengumpulan data sedang berlangsung.

5 <https://events.globallandscapesforum.org/agenda/biodiversity-2020/29-october-2020/lessons-from-indonesia-building-a-nature-based-economy-through-jurisdictional-approaches/>

Kemajuan yang terlihat di tiga kabupaten percontohan KDSD dapat dikaitkan dengan setidaknya tiga faktor yang sudah ada sebelumnya yang saling berkaitan (lihat Boks 1): (i) komitmen kuat pemerintah kabupaten dan pimpinannya terhadap pembangunan berkelanjutan; (ii) kehadiran unsur non-pemerintahan yang secara aktif berpartisipasi dalam diskursus pembangunan daerah; dan (iii) adanya forum multipemangku kepentingan untuk pembangunan berkelanjutan.

Kemajuan yang terlihat hingga saat ini juga didorong oleh dukungan teknis langsung dari para peneliti CIFOR dalam proses membangun perubahan. Salah satu contoh penting, seorang peneliti CIFOR memberikan dukungan teknis secara langsung dan berkesinambungan kepada Sekretariat LTKL selama dua tahun. Peneliti CIFOR dan LTKL terlibat secara langsung dalam membantu kebutuhan kabupaten, termasuk melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan melalui lokakarya di tingkat kabupaten dan berperan sebagai penasihat setiap kali proses pengumpulan data menemui kendala. Saat ini, peneliti CIFOR terus membantu Sekretariat LTKL, saat kabupaten melakukan pengumpulan data primer, antara lain dengan memberikan petunjuk teknis dalam diskusi kelompok terpusat (FGD).

Boks 1. Tinjauan tentang lingkungan pendukung untuk keberlanjutan dan KDSD di tingkat kabupaten

Menjadi anggota LTKL, tiga yurisdiksi percontohan KDSD dan para Bupati telah mengakui pentingnya mengembangkan rantai pasok pertanian yang berkelanjutan. Melalui pembentukan Siak Hijau dan Sintang Lestari, Kabupaten Siak dan Sintang telah berkomitmen untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang komprehensif (Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak 2019; Pemerintah Kabupaten Sintang 2019), sedangkan Gorontalo telah berkomitmen mengalokasikan 10 persen dari anggarannya untuk inisiatif adaptasi perubahan iklim (Transformasi 2017). Selain instansi pemerintah, ada berbagai aktor berpengaruh yang terlibat, diantaranya termasuk universitas, Koalisi Privat Sektor untuk Siak Hijau (KPSSH – Siak), organisasi masyarakat sipil (misalnya Kito Siak di Siak, Japesda di Gorontalo dan FKMS di Sintang), dan mitra pembangunan (misalnya CSF dan WWF di Sintang dan Sedagho Siak di Siak). Pemerintah Sintang secara khusus telah membentuk forum multipemangku kepentingan yang disebut Sekretariat Bersama untuk mengoordinasikan pelaksanaan Sintang Lestari. Secara bersama, faktor-faktor ini telah berkontribusi pada pencapaian yang terlihat sejauh ini selama proses KDSD.

Proses yang masih berjalan serta peluang penelitian dan penerlibatan lebih lanjut

Lokakarya yang diselenggarakan bersama oleh Sekretariat LTKL dan CIFOR telah berhasil membantu dalam: (i) memulai pengumpulan data untuk KDSD di semua kabupaten percontohan; (ii) membuat struktur tim kerja KDSD; dan (iii) menetapkan *kerangka waktu* dan target yang ingin dicapai. Lokakarya tersebut juga menyoroti pentingnya membawa semua pemangku kepentingan yang relevan ke dalam forum, seperti yang dijelaskan oleh dosen senior dan peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG): *“Setelah pertemuan pertama di mana CIFOR terlibat, kami menyadari bahwa jika kami ingin merumuskan profil [yurisdiksi] dan melaksanakan KDSD, tidak mungkin hanya melibatkan beberapa pihak secara terbatas. Pada pertemuan kedua kami memperluas dan mengundang lebih banyak pihak. Selain pejabat pemerintah dan perwakilan universitas, kami juga mengundang kelompok tani dan organisasi masyarakat sipil (LSM).”*

Hingga Agustus 2020, Kabupaten Sintang telah mengumpulkan sekitar 72 persen data yang dibutuhkan untuk KDSD, mengungguli progres di Gorontalo dan Siak (TFA 2020). Awal pengumpulan data – dan laju progresnya – di setiap kabupaten bervariasi karena perbedaan kapasitas kelembagaan, masalah yang berkaitan dengan data (misal ketersediaan dan format), perbedaan kondisi pendorong yang sudah ada sebelumnya dari aktor-aktor non-pemerintahan (seperti mitra pembangunan atau LSM), dan forum multipemangku kepentingan. Secara keseluruhan, perkembangan di semua kabupaten percontohan secara signifikan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan karena pandemi COVID-19, akibat dari pemberlakuan pembatasan mobilitas dan keharusan bagi pemerintah kabupaten untuk merealokasi anggaran mereka untuk fokus pada langkah-langkah terkait penanganan pandemi. Meskipun demikian, kabupaten tetap berkomitmen untuk melaksanakan KDSD dalam masa yang penuh tantangan ini, sebagaimana dinyatakan oleh pejabat tingkat tinggi di Kabupaten Siak yang berkomitmen untuk *“memulai kembali dan mengumpulkan kembali semua pihak yang terlibat, termasuk instansi pemerintah, sektor swasta dan organisasi terkait lainnya.”* Selain itu, profil yurisdiksi, yang disambut sebagai cara untuk *“mempromosikan yurisdiksi secara singkat, ringkas dan hemat”* juga masih dalam proses. LTKL dan CIFOR bertujuan untuk menerbitkan beberapa profil lagi pada pertengahan 2021, membantu kabupaten untuk mempromosikan dirinya di panggung global.

Data dan informasi yang dikumpulkan di kabupaten akan dimasukkan ke dalam ‘Laporan Daya Saing Daerah’ atau *Regional Competitiveness Report*. Laporan ini akan menggambarkan kondisi, lingkungan pendukung atau

enabling conditions yang tersedia, dan potensi investasi berkelanjutan di kabupaten serta kolaborasi multipemangku kepentingan untuk mendukung progres keberlanjutan (LTKL n.d.). Laporan tersebut akan disusun bersama oleh tim KDSD masing-masing kabupaten dengan dukungan dari Sekretariat LTKL. CIFOR saat ini membantu LTKL untuk mengembangkan *template* laporan ini, melalui konsultasi via lokakarya multipemangku kepentingan setiap bulan dari akhir April hingga pertengahan 2021.

Mekanisme pemantauan dan pelaporan progres di tingkat lokal seperti KDSD dapat membantu mengatasi berbagai masalah baik di tingkat nasional maupun subnasional, seperti masalah seputar hak atas tanah serta perencanaan dan investasi di tingkat lokal. Mayoritas responden tingkat kabupaten optimis bahwa data dan informasi yang dikumpulkan untuk KDSD dapat membantu pemerintah kabupaten untuk *“memutuskan program pertanian strategis mana yang [harus] dimasukkan dalam perencanaan, yang berdaya saing dalam skala, dan yang dapat mendorong ekonomi lokal lebih jauh”*, serta membantu memperjelas dan menyelaraskan upaya dan kepentingan berbagai organisasi perangkat daerah di kabupaten yang menangani masalah serupa, termasuk penerbitan izin dan investasi. Data dan informasi spasial tentang konsesi petani kecil yang jelas juga akan membantu mereka dalam memperoleh sertifikasi keberlanjutan yang berpotensi menghasilkan manfaat baik dari segi mata pencaharian dan lingkungan. Pengumpulan data yang sedang berlangsung juga dapat meluas untuk menginformasikan implementasi inisiatif nasional lainnya, seperti reforma agraria (Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA) dan skema perhutanan sosial.

Semua potensi capaian tersebut dapat terwujud sepenuhnya jika KDSD diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan pemerintah nasional (LTKL n.d.), misalnya dalam LPPD ke Kemendagri dan pelaporan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke Sekretariat SDG Nasional dan kementerian terkait lainnya. Integrasi ke dalam sistem pelaporan nasional berarti kepastian dan keberlanjutan kerangka kerja sebagai sistem MRV subnasional. Se jauh ini, KDSD menunjukkan potensi, karena *“lebih mudah dilihat dan diukur, berpotensi membuat evaluasi kemajuan lebih cepat,”* demikian disampaikan pejabat tinggi Kabupaten Siak. Keputusan untuk fokus pertama pada transformasi rantai pasokan pertanian berkelanjutan sebagai titik masuk juga strategis, karena subjek ini bersinggungan dengan banyak isu lain yang menarik bagi kabupaten (misalnya, perhutanan sosial dan kebakaran hutan). Hal ini membuka kemungkinan inisiatif ini untuk berkembang menjadi pendekatan reformasi ekonomi ‘hijau’ lintas sektoral yang komprehensif.

Akan tetapi, agar inisiatif seperti ini menjadi permanen, perubahan nyata perlu diwujudkan terlebih dahulu (misal inisiatif terbukti memberikan manfaat sosial-ekonomi dan perlindungan lingkungan yang nyata) dan didokumentasikan, dan ini membutuhkan komitmen dan upaya kontinu, serta

advokasi berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan di semua tingkatan. Untuk itu, tiga kabupaten percontohan (yang menjalani pemilihan kepala daerah pada Desember 2020) telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk melanjutkan implementasi KSDS dan transformasi rantai pasok pertanian yang berkelanjutan. Hal terpentingnya, kabupaten-kabupaten ini sedang dalam proses mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) baru dan telah berkomitmen untuk menyusun strategi pendekatan yurisdiksi dalam rencana pembangunan mereka, mengikuti contoh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, jadwal pengembangan RPJMD berbeda-beda karena Bupati terpilih dilantik pada waktu yang berbeda (mis., 26 Februari 2021 untuk Gorontalo dan 17 Juni 2021 untuk Siak).

Semakin banyak kabupaten di Indonesia mulai tertarik pada inisiatif dan kebijakan berkelanjutan yang inovatif, sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Siak, misalnya, baru-baru ini menjadi salah satu kabupaten pertama yang menetapkan skema transfer fiskal berbasis ekologi dari kabupaten ke pemerintah desa (dikenal sebagai TAKE)⁶, sementara Sintang telah melakukan penghargaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya untuk melibatkan dan memberi penghargaan kepada perusahaan yang berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan. Beberapa hasil awal dari kemitraan LTKL-CIFOR khususnya telah mendorong kabupaten-kabupaten LTKL lainnya untuk melakukan percontohan implementasi kerangka kerja dan membuat profil yurisdiksi mereka sendiri (misalnya, Musi Banyuasin dan Aceh Tamiang). Namun, menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan mata pencaharian dengan agenda lingkungan dan iklim tetap merupakan pekerjaan yang terus berjalan.

Kebijakan, inisiatif, dan aksi yang diterapkan di semua tingkat hingga saat ini telah menghasilkan berbagai pencapaian, tetapi pekerjaan ini masih jauh dari selesai. Pada akhir 2020, ada enam provinsi dan satu kabupaten dengan program REDD+ berbasis yurisdiksi yang sedang berlangsung di Indonesia.⁷ Jumlah ini bertambah jika kita memperluas cakupan di luar REDD+ dan memasukkan inisiatif subnasional yang sedang berlangsung seperti KSDS atau inisiatif yurisdiksi kelapa sawit berkelanjutan yang diamanatkan di bawah Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).⁸ Dengan

mempertimbangkan berbagai tindakan yang diambil sejauh ini, CIFOR telah mengidentifikasi kebutuhan untuk memberikan bukti yang lebih sistematis untuk memahami kebijakan dan aksi mana yang paling berhasil, dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memberikan hasil yang efektif, efisien dan berkeadilan untuk mendorong perubahan transformasional di sektor kehutanan dan tata guna lahan.

Kesimpulan

Pendekatan yurisdiksi untuk REDD+ dan pembangunan rendah emisi saat ini semakin mapan. Sebagai lembaga penelitian dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang pendekatan yurisdiksi, CIFOR berada pada posisi strategis di Indonesia. CIFOR mampu berkontribusi pada penyusunan nota konsep pendekatan yurisdiksi yang dikembangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan nasional Indonesia (RPJMN), sekaligus memengaruhi implementasi pendekatan yurisdiksi di tingkat kabupaten. Namun, pekerjaan yang telah dilakukan CIFOR dan mitra strategisnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan skala yurisdiksi kabupaten baru saja dimulai. Langkah majunya hingga saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sebelumnya sudah ada di tingkat lokal, seperti komitmen pemerintah kabupaten yang kuat dan berkesinambungan untuk pembangunan keberlanjutan, dukungan kontinu dari unsur-unsur non-pemerintah dalam diskursus pembangunan kabupaten, serta kehadiran peneliti CIFOR yang tertanam di dalam proses perubahan. Dalam waktu dekat, program penelitian GCS REDD+ CIFOR akan terus berbagi pengetahuan dan meminjamkan keahliannya kepada LTKL dan mitra-mitra strategis lainnya dalam rangka mencapai pembangunan yurisdiksi yang berkelanjutan di kabupaten-kabupaten Indonesia, termasuk membantu lebih banyak kabupaten anggota LTKL dalam hal implementasi inisiatif komoditas berkelanjutan dan KSDS.

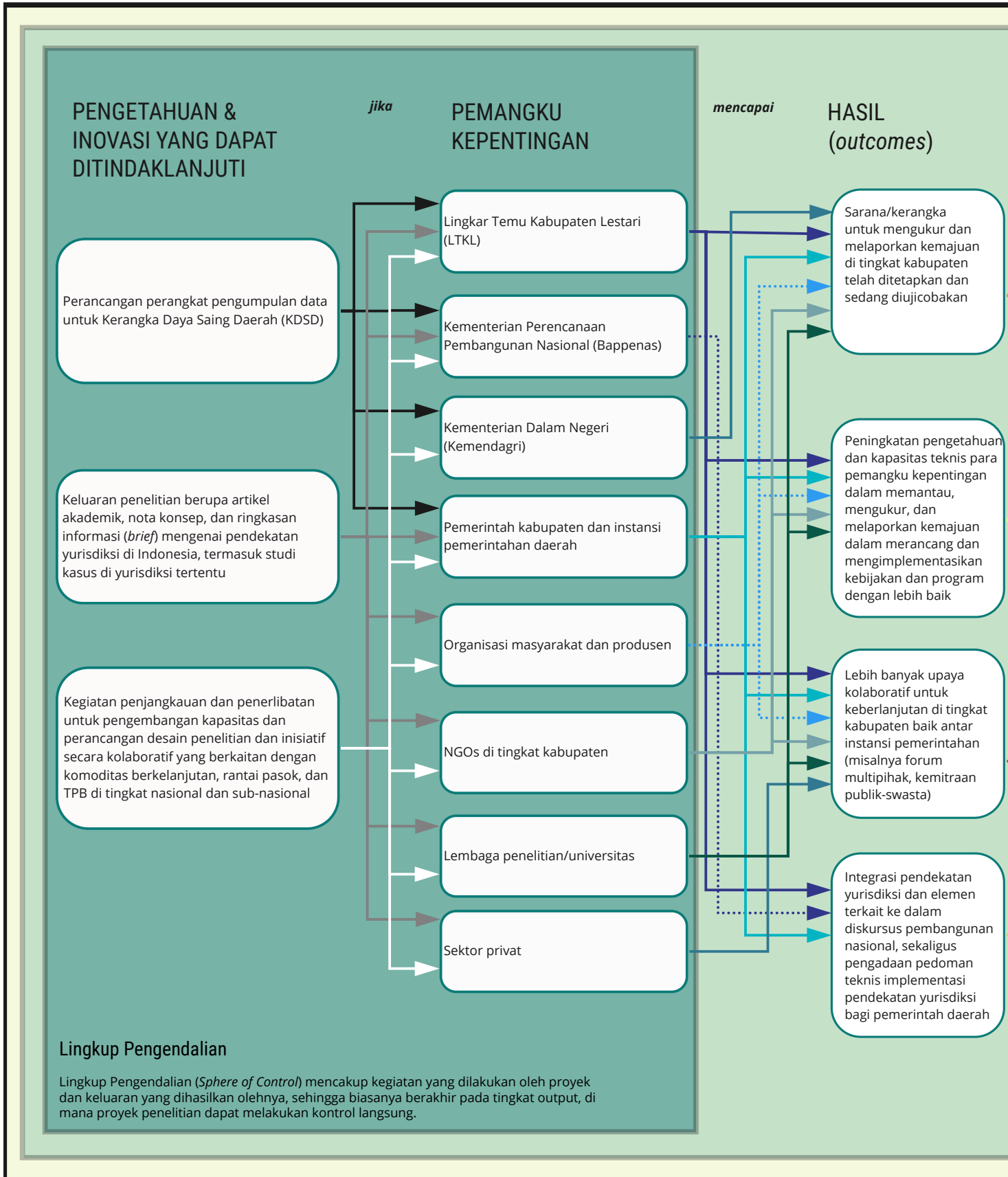
Ucapan terima kasih

Penelitian ini merupakan bagian dari Studi Komparatif Global tentang REDD+ (<http://www.cifor.org/gcs>), yang didukung oleh Badan Kerja Sama Pembangunan Norwegia (Norad); Inisiatif Iklim Internasional (IKI) dari Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir Pemerintah Federal Jerman (BMU); dan Dana CGIAR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA) yang dipimpin oleh CIFOR. Pendapat yang disampaikan di sini merupakan tanggung jawab penulisnya, dan tidak serta merta mencerminkan pandangan CIFOR, CGIAR, atau lembaga donor yang lain. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat LTKL atas dukungan yang diberikan dalam penyusunan 'cerita perubahan' ini.

6 TAKE saat ini tengah dikembangkan di kabupaten anggota LTKL lainnya, seperti Kabupaten Sanggau (Kalimantan Barat) dan Sigi (Sulawesi Tengah).

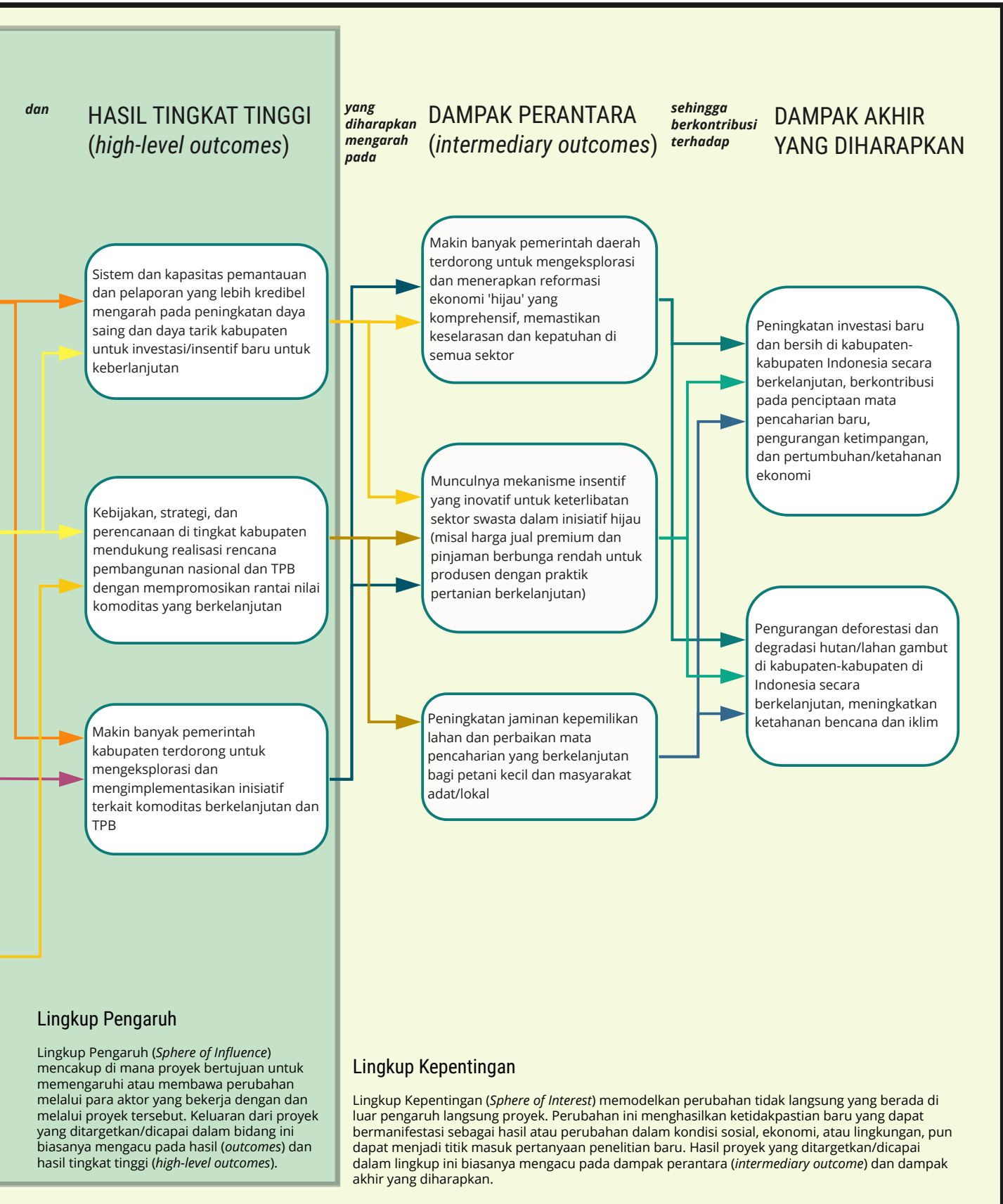
7 <https://www.reddprojectsdatabase.org/view/projects.php?id=360&name=Indonesia&type=program>

8 Institut Pertanian Bogor dan Bappenas, dengan dukungan dari LTKL and GIZ Indonesia, sedang mempersiapkan panduan perencanaan perkebunan berkelanjutan berbasis yurisdiksi (untuk komoditas kelapa sawit). Menurut representatif dari GIZ Indonesia: "satu hal yang sangat menonjol dalam pedoman ini, dan ini diadaptasi dari KSDS, adalah penekanan pada pengembangan secara multipemangku kepentingan."



Gambar 1. Teori perubahan yang menjelaskan jalur kerja dan dampak dari penelitian GCS REDD+ tentang pendekatan yurisdiksi di Indonesia

Sumber: Ilustrasi penulis



Referensi

- Boyd W, Stickler C, Duchelle AE, Seymour F, Nepstad D, Bahar NHA dan Rodriguez-Ward D. 2018. Jurisdictional approaches to REDD+ and low emissions development: Progress and prospects. Washington DC: World Resources Institute. <https://www.cifor.org/knowledge/publication/6933/>
- de Sassi C, Sunderlin WD, Sills EO, Duchelle AE, Ravikumar A, Resosudarmo IAP, Luttrell C, Joseph S, Herold M, Kweka DL dan Atmadja SS. 2014. REDD+ on the ground: Global insights from local contexts. *Di* Sills EO, Atmadja SS, de Sassi C, Duchelle AE, Kweka DL, Resosudarmo IAP dan Sunderlin WD, eds. *REDD+ on the ground: A case book of subnational initiatives across the globe*. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://www.cifor.org/knowledge/publication/5284/>
- Duchelle AE, Greenleaf M, Mello D, Gebara MF dan Melo T. 2014. Acre's State System of Incentives for Environmental Services (SISA), Brazil. *Di* de Sassi C, Sunderlin WD, Sills EO, Duchelle AE, Ravikumar A, Resosudarmo IAP, Luttrell C, Joseph S, Herold M, Kweka DL and Atmadja SS, eds. *REDD+ on the ground: Global insights from local contexts*. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://www2.cifor.org/redd-case-book/case-reports/brazil/acres-state-system-incentives-environmental-services-sisa-brazil/>
- LTKL (Lingkar Temu Kabupaten Lestari). 2019. Jurisdictional approach in Indonesia: Progress to date. Jakarta: LTKL.
- LTKL. n.d. Regional Competitiveness Framework. Jakarta: Lingkar Temu Kabupaten Lestari.
- Pemerintah Kabupaten Sintang. 2019. Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL) Periode 2019–2021. Sintang: Pemerintah Kabupaten Sintang.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peteru S, Duchelle AE, Stickler C, Durbin J, Luque C dan Komalasari M. 2021. Participatory use of a tool to assess governance for sustainable landscapes. *Frontiers in Forests and Global Change* 4. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2021.507443>
- Ravikumar A, Larson AM, Duchelle AE, Myers R dan Gonzales Tovar J. 2015. Multilevel governance challenges in transitioning towards a national approach for REDD+: Evidence from 23 subnational REDD+ initiatives. *International Journal of the Commons* 9:909–931. <https://doi.org/10.18352/ijc.593>
- Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak. 2019. Peta jalan Siak menuju kabupaten hijau: Pedoman untuk mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan peningkatan ekonomi masyarakat. Siak, Sumatra, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Siak.
- Seymour FJ, Aurora L dan Arif J. 2020. The jurisdictional approach in Indonesia: Incentives, actions and facilitating connections. *Frontiers in Forests and Global Change* 3. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326>
- Sills EO, Atmadja SS, de Sassi C, Duchelle AE, Kweka DL, Resosudarmo IAP dan Sunderlin WD, eds. 2014. *REDD+ on the ground: A case book of subnational initiatives across the globe*. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/005202>
- Stickler C, Duchelle AE, Ardila JP, Nepstad D, David O, Chan C, Rojas JG, Vargas R, Bezerra T, Pritchard I, dkk. 2018a. *The State of Jurisdictional Sustainability: Synthesis for Practitioners and Policymakers*. San Francisco, CA and Bogor, Indonesia: Earth Innovation Institute and CIFOR. <https://www.cifor.org/knowledge/publication/6999/>
- Stickler C, Duchelle AE, Nepstad D dan Ardila JP. 2018b. Subnational jurisdictional approaches: Policy innovation and partnership for change. *Di* Angelsen A, Martius C, Sy VDS, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://www.cifor.org/knowledge/publication/7072>
- Sukri W, Oktavianus B, Anastasia Parwadi F, Prawiyanto Y, Isnandar A, Subariyanti E, Hermanto, Firdaus, Epi P, Perdana ZHJ, dkk. 2020. Sintang District, West Kalimantan, Indonesia: Low-emission rural development (LED-R) at a glance. *Di* Stickler C, Duchelle AE, Ardila JP, Nepstad D, David O, Chan C, Rojas JG, Vargas R, Bezerra T, Pritchard I dkk., eds. *The State of Jurisdictional Sustainability: Synthesis for Practitioners and Policymakers*. San Francisco, CA and Bogor, Indonesia: Earth Innovation Institute and CIFOR. <https://www.cifor.org/knowledge/publication/7797/>
- Syahrani G, Istanti RP, Pasaribu PR, Peteru S dan Duchelle AE. 2020. Lessons from Indonesia: Building a nature-based economy through jurisdictional approaches. White Paper produced by LTKL and CIFOR for the Global Landscapes Forum. <https://www.globallandscapesforum.org/publication/lessons-from-indonesia-building-a-nature-based-economy-through-jurisdictional-approaches/>
- Transformasi. 2017. 10 persen APBD Kabupaten Gorontalo untuk adaptasi perubahan iklim. Limboto, Gorontalo.
- TFA (Tropical Forest Alliance). 2020. Learning from Jurisdictions: Data Collection for LTKL's Regional Competitiveness Framework (Webinar). <https://www.tropicalforestalliance.org/en/news-and-events/events/learning-from-jurisdictions-data-collection-for-ltkls-regional-competitiveness-framework>
- Wunder S, Duchelle AE, de Sassi C, Sills EO, Simonet G dan Sunderlin WD. 2020. REDD+ in theory and practice: How lessons from local projects can inform jurisdictional approaches. *Frontiers in Forests and Global Change* 3. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00011>



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani (FTA) adalah penelitian terbesar di dunia dalam program pembangunan guna meningkatkan peran hutan, pohon, dan wanatani dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan, serta untuk mengatasi perubahan iklim. CIFOR memimpin FTA dalam kemitraan dengan ICRAF, Aliansi Bioersity International dan CIAT, CATIE, CIRAD, INBAR dan TBI.

Penelitian FTA didukung oleh Dana Perwalian CGIAR: cgiar.org/funders



Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

cifor.org

forestsnews.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya; Yaounde, Kamerun; Lima, Peru dan Bonn, Jerman.

